

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979
- Adrian Sutedi. 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- AP. Parlindungan. 1986. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni.
- Arie Sukanti Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. hlm.19
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 305.
- Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan Boedi. hlm.18.
- C.S.T. Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewa Gede Atmadja. 2013. *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press.
- Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS)*, 2017, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
- Dominikus Rato. 2011. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Justicia.
- Dyara Radhite dan Oryza Fea. 2018. *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*. Yogyakarta: Legality.

- Effendi Parangin. 1991. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Effendy Perangin. 2005. *Edisi Revisi Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fransiscus Xaverius Sumarja, et all, *Problem Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Sekitar Bandar Udara*, Pusaka Media, Bandarlampung.
- G. Kartasapoetra dkk. 1991. *Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 7
- H. Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, 2007, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, 1994, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Koeswahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Inu Kencana Syafie. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Inu Kencana Syafie. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Irawan Soerodjo. 2002. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- John Rawls. 1999. *A Theory of Justice*, Cambridge-Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- John Salindeho. 1993. *Masalah Tanah dalam Pembangunan* Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadam Labobo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muliawan. 2009. *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal*. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Muljadi dan Kartini. 2004. *Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Penadamedia Group.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, 2020, Duta Media Publishing, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Ull Press.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta,.
- Sarjita, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Tugu Jogja, Yogyakarta.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, Jakarta..
- Soetandiyi Wignjosoebroto, *Pengertian Kepentingan Umum Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah*, Gema Clipping Service, dalam Muhandar, *Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Petanahan*, LaksbangPressindo, Yogyakarta 2006.

Soetandyo Widnjosoebroto, 1991, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Pers, Malang.

Titik Triwulan dan Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zaidan Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

lin Indrasanti. 2017. *Pelaksanaan Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Melaksanakan Pengurusan Harta Peninggalan*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Khrisna Djaya Darumurti. 2005. *Konsep dan Asas Hukum Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Lieke Lianadevi Tukgali, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Ketas Putih Communication, Jakarta, 2010.

Tatit Januar Habibi, *Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Abuyazid Bustomi. 2020. *Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah*. Jurnal Solusi. Volume 18 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang.

Yani Pujiwati dkk. 1999. *Pendaftaran Tanah Negara berdasarkan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Jurnal Sosiohumaniora. Volume 1 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah